

## DAFTAR PUSTAKA

- Gurning, F. P., & Daulay, A. J. (2018). Pembinaan Puskesmas Terhadap Pelaksanaan Program Usaha Kesehatan Sekolah Di Wilayah Kerja Puskesmas Padang Matinggi Kota Padangsidempuan, 3(1).
- Kalangi, R. (2015). Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Kinerja, 2, 1–18.
- Kementrian Kesehatan RI. (2009). Undang-undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009.
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. (2014). *Pedoman Pelaksanaan UKS di Sekolah*.
- Kurniawan, F. (2015). Pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di SD Negeri 05 Kalumbuk Kecamatan Kuranji Kota Padang.
- Mahardhani, R. (2016). Keterlaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Di SMP Muhammadiyah 8 Yogyakarta Tahun Ajaran 2015/2016.
- Masram dan Mu'ah. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Surabaya: Zifatama.
- Mayadi, Drs. H. Kaswari, E. P. (2018). Implementasi Pelaksanaan Kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah SMP Negeri 1 Bengkayang di Kabupaten Bengkayang.
- Novariana, N., Sefa, N., & Hermawan, A. (2018). Analisis Pengelolaan Trias Usaha Kesehatan Sekolah ( UKS ) di Tingkat SMP Se-Kota Bandar Lampung ( Studi Kualitatif ), 9(April), 12–20.
- Nugroho, S. (2017). Pelaksanaan Usaha kesehatan Sekolah Di Sekolah Dasar Negeri 1 Grogol Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul.
- Permatasari, R. (2019). Penerapan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Dalam Pencegahan TB Di Puskesmas Kota Pekanbaru Tahun 2019.
- Permenkes. (2011). *Pedoman PHBS*.

- Permenkes. (2016). *Pedoman penyelenggaraan PIS-PK*.
- Prastyawan. (2016). *Manajemen Sarana Dan Prasarana Pendidikan*, 6.
- Rahmawati, E. I., & Soetopo, H. (2015). *Manajemen usaha kesehatan sekolah*.
- Sahroni, A. (2016). *Tingkat Keterlaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah Pada Sekolah Dasar Negeri Se-Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunungkidul Tahun Ajaran 2015/2016*.
- Soepardi, J. (2015). *Pedoman Akselerasi Pembinaan dan Pelaksana UKS*. Jakarta.
- Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Unicef. (2018). *Strategi komunikasi usaha kesehatan sekolah/madrasah*.
- Yuniar, Y. (2016). *Ketersediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dalam Era Jaminan Kesehatan Nasional di Delapan Kabupaten-Kota di*, (75), 201–210.